

## **Abstrak**

Salah satu siklus pengelolaan Barang Milik Negara yaitu Penghapusan Barang Milik Negara. Penghapusan Barang Milik Negara merupakan suatu tindakan dalam menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam praktiknya, prosedur penghapusan Barang Milik Negara cukup rumit dan memakan waktu yang lama karena membutuhkan otorisasi dari banyak pihak serta membutuhkan persyaratan yang cukup banyak agar penghapusan Barang Milik Negara tersebut dapat disetujui. Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara yang dibahas pada tugas akhir ini yaitu berupa kendaraan dinas yang telah mengalami rusak berat dan telah melewati masa manfaat, sehingga tidak mungkin lagi untuk dilakukan pemeliharaan sehingga lebih menguntungkan apabila BMN tersebut diusulkan untuk dihapuskan dengan cara mekanisme lelang.

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara teori yang didapatkan dengan praktik yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dengan mekanisme lelang. Dalam praktiknya, kegiatan penghapusan BMN tersebut yang diawali dengan pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan peraturan PMK 111/PMK.06/2016 yang telah diubah menjadi PMK 165/PMK.06/2021 serta PMK 83/PMK.06/2016. Penyusunan tugas akhir ini didukung oleh hasil wawancara dengan pihak KPKNL Medan. Hasil penelitian ini akan dituangkan menjadi analisis pembahasan yang diperoleh dari data-data yang didapatkan dari narasumber.

Kata kunci: Barang Milik Negara, Penghapusan, KPKNL Medan

## **Abstract**

*One of the cycles of management of State-Owned Asset is the Write-Off the State-Owned Asset. A write-Off State-Owned Asset is an act of removing a State-Owned Asset from the list of goods by issuing a decision from the competent authority to release the Asset Manager, Asset User, and/ or Asset User Proxy from administrative and physical responsibility for the goods that are in their control. In practice, the procedure for the elimination of State-Owned Asset is quite complicated and takes a long time because it requires authorization from many parties and requires quite a lot of requirements so that the abolition of State-Owned Asset can be approved. The implementation of the abolition of State-Owned Asset discussed in this final project is in the form of an official vehicle that has been heavily damaged and has passed its useful life so that it is no longer possible to carry out maintenance so that it is more profitable if the State-Owned Asset is proposed to be abolished using an auction mechanism.*

*The purpose of writing this final project is to find out the relationship between the theory obtained and the existing practice in the field regarding the implementation of the abolition of State-Owned Asset with the auction mechanism. In practice, the State-Owned Asset abolition activity, which begins with the auction, is following the regulation PMK 111/PMK.06/2016 which has been changed to PMK 165/PMK.06/2021 and PMK 83/PMK.06/2016. The preparation of this final project is supported by the results of interviews with employees at KPKNL Medan. The results of this study will be poured into an analysis of the discussion obtained from the data obtained from the sources.*

**Keywords:** *State-Owned Asset, Write-Off, KPKNL Medan*